

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Demokrasi merupakan sebuah fenomena yang selalu menarik untuk dikaji, bahkan sekarang ini gagasan demokrasi sangat terkenal di seluruh dunia. Kebanyakan rezim berusaha menyatakan dirinya demokratis. Rezim yang tidak demokratis sekalipun, seringkali bersikeras bahwa keadaan khusus mereka yang tidak demokratis itu merupakan suatu tahap yang penting untuk akhirnya sampai pada demokrasi. Terlebih lagi, dewasa ini demokrasi dijadikan sebagai tolok ukur konstruksi peradapan manusia, dengan pemikiran bahwa semakin demokratis suatu negara, maka negara tersebut dianggap semakin modern. Hal ini telah membuat demokrasi menjadi sebuah gagasan yang sangat populer di seluruh dunia dan selalu menarik untuk dikaji lebih dalam.

Namun ada kalanya demokrasi dijadikan sebagai alasan penguasa yang diktator untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Dengan mengatasmakan sistem demokrasi perwakilan, kekuasaan akan berputar hanya di kalangan elit saja, fenomena inilah yang terjadi di Filipina. Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menerapkan sistem demokrasi dua-partai, dimana sistem ini diadopsinya dari negara yang pernah menjajahnya, yaitu Amerika Serikat.¹ Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata

¹ Alfian, " *Tingkah Laku Politik di Asia Tenggara* ", LIPI, Jakarta , 1973, hal.20

dan perbedaan kelas yang sangat ekstrim telah menjadikan sistem demokrasi yang diterapkan di sana gagal dalam menjalankan makna sejatinya, yaitu bersumber dari keinginan seluruh rakyat dan bertujuan untuk kebaikan semua rakyat itu. Tentunya kesenjangan sosial ekonomi yang begitu ekstrim bukanlah satu-satunya faktor penghambat laju demokrasi di Filipina. Hal itulah yang ingin digali dan diteliti penulis lebih dalam lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, telah mendorong keinginan penulis untuk meneliti dengan perspektif akademis, mengembangkan serta menguji kebenaran dari teori-teori yang pernah penulis peroleh semasa kuliah. Dengan menjadikan proses demokrasi di Filipina, serta penyebab kegagalan dari proses demokrasi tersebut sebagai bahan penelitian skripsi. Dikarenakan Filipina mengalami puncak kegagalan demokrasi pada masa pemerintahan rezim Marcos, maka penulis memilih judul skripsi **“FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DEMOKRASI DI FILIPINA PADA MASA PEMERINTAHAN FERDINAND MARCOS (1965-1986)”**

B. Latar Belakang Masalah

Di Eropa, abad pencerahan dan penyebarannya ide-ide liberal telah mengawali lahirnya demokrasi. Perhatian utama demokrasi di Barat pada abad pertama kelahirannya adalah membentuk institusi yang memadai bagi demokrasi konstitusional dan demokrasi parlementer, perluasan partisipasi politik seraya memelihara sistem yang berfungsi dan efektif.

Namun pada waktu demokrasi meluas di Eropa, demokrasi itu tidak diperluas di koloni-koloni jajahan mereka. Di Inggris sendiri, kaum wanita

tidak memiliki hak suara sampai dengan tahun 1928. Namun bagaimanapun, ide-ide demokratis digunakan kaum nasionalis di negara jajahan untuk melegitimasi revolusi anti kolonial.

Demokrasi lalu dicangkokkan di negara-negara baru Dunia Ketiga, yang banyak bermunculan setelah berakhirnya PD II, usaha ini dilakukan melalui cara peralihan kekuasaan. Dalam kasus negara Filipina, walaupun sistem demokrasi yang diterapkan mirip dengan yang diterapkan di negara penjajahnya yaitu Amerika Serikat, namun institusi-institusi yang dicangkokkan itu telah digeser oleh warisan politik dan budaya yang ada ditambah lagi tekanan-tekanan dari konteks faktor kesenjangan ekonomi, sosial dan politik di negara tersebut.²

Sejak mencapai kemerdekaan, kebanyakan dari negara-negara Dunia Ketiga telah menjalani perubahan yang mendadak dan dratis dalam pemerintahannya yang disebabkan oleh pemberontakan, huru-hara, demonstrasi, kudeta dan sebagainya. terlebih lagi terhadap negara yang terbuka terhadap penetrasi Barat seperti Filipina, tentunya juga akan mengalami periode gejolak sosial dan ketidakpastian politik. Jadi ketidakpastian telah merupakan sifat yang sangat menonjol dalam politik Dunia Ketiga. Pemerintahan-pemerintahan demokratis yang relatif lunak telah terbukti sangat lemah, namun pemerintahan otoriter yang menggantikannya juga tidak mampu mempertahankan kekuasaannya

Di Asia Tenggara, dapat dikatakan bahwa Filipina merupakan satu-satunya negara yang mempraktekkan demokrasi parlementer yang mirip dengan demokrasi Anglo-Amerika. Hal ini tergolong unik, walau tidak dapat dipungkiri sebagaimana demokrasi yang ada di negara-negara Asia lainnya, muncul rezim otoriter yang kemudian menjadikan demokrasi sebagai alat untuk dapat terus berkuasa. Walau di satu sisi, kultur Asia memang lebih cenderung melahirkan pemimpin yang diktator dan otoriter.

Filipina dijajah oleh bangsa Spanyol selama lebih kurang tiga abad dan kemudian dijajah oleh Amerika selama 57 tahun. Amerika dapat dikatakan sebagai negara penjajah yang pertama kali mengenalkan demokrasi kepada bangsa Filipina.³ Namun demikian, semangat demokrasi sudah lama muncul, terutama sekali terlihat ketika terjadi Revolusi Filipina (1896) yang merupakan gerakan nasionalis pertama di Asia, dengan pelapornya Jose Rizal.⁴

Pada masa penjajahan Spanyol, untuk menjalankan kebijakan-kebijakan kolonialnya, Spanyol menggalakkan pendidikan formal dan informal. Pendidikan informal diberikan melalui khotbah selama Misa di Gereja dan bentuk-bentuk khotbah atau pengajaran yang dilakukan dari Kota ke kota oleh para misionaris. Sedangkan pendidikan formal diberikan melalui sekolah dan *kolase*. Pada awalnya hanya para imam suci kristiani yang mengajar, namun lama kelamaan guru-guru awam juga dipekerjakan, hal ini dikarenakan para

³ Jose S. Arcilla, SJ, *Pengantar Sejarah Filipina*, Sanata Dharma, Yogyakarta, 2002, hal 144

⁴ Clark D. Neher and Ross Marlay, *Democracy and Development in Souhterst Asia*, Westview Press, Colorada, 1995, hal 52.

imam yang berasal dari Spanyol kurang bahkan tidak menguasai bahasa tagalog.

Secara umum, pendidikan yang baik tidak mudah didapatkan di Filipina pada masa penjajahan Spanyol. Selain dikarenakan terbatasnya sarana pendidikan yang memadai, Gereja sangat berpengaruh dan benar-benar mengendalikan sekolah-sekolah setempat. Namun kekayaan *Mestizo* (merupakan hasil peranakan kaum Spanida-Pribumi Cina) sangat besar, perekonomian mereka maju pesat dengan internasionalisasi ekonomi, mereka telah menjadi kroni kapitalisme di Filipina. Hal ini memungkinkan kaum pria muda *Mestizo* untuk menuntut ilmu di Eropa. Kemudian mereka inilah yang dinamakan kaum *ilustrado* (orang-orang tercerahkan atau kalangan berpendidikan), Jose Rizal adalah salah satu diantara kaum *Mestizo* yang beruntung ini. Kaum *ilustrado* terbentuk selama dasawarsa 1880-an dan terus berkembang menjadi kelompok cendekiawan yang kritis terhadap dominasi politik Spanyol. Hal ini dikarenakan mereka yang kaya dan terpelajar ini tidak memiliki kekuasaan politik. Sementara politik dikuasai oleh para *Gobernadorcillo* dan *Cabeza de barangay*, mereka membentuk elit-lokal, atau *principalia* dengan hak-hak istimewa seperti menggunakan gelar kehormatan "Don", walaupun mereka tidak kaya raya dan memiliki pendidikan tinggi⁵.

Walaupun Filipina era Spanyol lebih bersifat hierarkis dan kedudukan sosial diterima sebagaimana mestinya, namun gaya pemerintahan Spanyol memiliki unsur-unsur demokratis. Misalnya, pada tanggal 5 Desember 1740, upeti ditetapkan 10 *reales castellanos* atau ekuivalensinya dalam bentuk barang. Dalam beberapa kasus, itulah yang dapat dilakukan oleh orang-orang.

⁵ Benedict Anderson, "Hantu Komparasi : Nasionalisme Asia Tenggara dan Dunia", Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2002, hal 351

Barang-barang yang dapat diterima sebagai upeti adalah : *mantas de abaca* (kain abaka), kira-kira 20 kaki panjangnya dan 5 kaki lebarnya dan ekuivalensi 3 real. Juga diterima upeti *lampotes* (kain katun) yang berukuran panjang 20 kaki dan lebar 3 kaki dengan ekuivalensinya 4 real. Untuk memberitahukan kepada orang-orang kewajiban mereka, *Aquacil mayor barangay* (daerah), *principalia* dan orang-orang penting lainnya untuk bertemu dengan utusan dari Manila, mereka membicarakan perundang-undangan hingga kesepakatan dicapai. Pejabat pusat di Manila jarang memaksakan peraturan baru tanpa mendengarkan pandangan orang-orang di kota.⁶

Kemudian orang-orang Amerika menghancurkan armada Spanyol pada bulan Mei 1898. dan kemudian pada bulan Agustus di tahun yang sama, pasukan Amerika yang dipimpin oleh Dewey berhasil menaklukkan Spanyol. Setelah 327 tahun, Spanyol akhirnya kehilangan kolonialnya di Asia Tenggara, ironisnya Amerika Serikat menjadi penjajah yang baru.

Namun Amerika Serikat menyatakan bahwa ia tidak menjajah Filipina dengan cara tradisional. Mereka datang untuk "mendidik" orang-orang Filipina untuk berpolitik dan memerintah sendiri sebagai persiapan kemerdekaan yang sesungguhnya. Disinilah akar-akar demokrasi mulai dicangkokkan oleh Amerika kepada Filipina. Hal ini terlihat ketika Amerika mulai mengenalkan sistem pemilihan di Filipina. Amerika memperkenalkan pemilihan umum nasional untuk pertama kali di Filipina pada tahun 1907. Pemilihan dilangsungkan untuk memilih anggota badan legislatif rendah dan Dewan Nasional. Komisi Filipina, pada waktu itu satu-satunya lembaga legislatif, sekarang menjadi badan legislatif tinggi dan dewan legislatif baru di Filipina. Namun hak pilih masih terbatas dikalangan pria yang berpendidikan,

⁶ Jose S. Arcila, *Opcit*, hal 76

kaum wanita belum memiliki hak pilih sampai dibentuknya negara persemakmuran Filipina pada tahun 1935.

Dibentuknya negara persemakmuran Filipina dengan konstitusi 1935 merupakan titik terang demokrasi di Filipina. Selain membentuk suatu pemerintahan presidensial dan memperkenalkan suatu Majelis Nasional yang unikameral yang pada tahun 1940 diamandemen dan menetapkan adanya lembaga legislatif yang bikameral (yang bertahan hingga pemberlakuan Martial Law, tahun 1972), konstitusi 1935 juga menjamin pemilihan dengan dibentuknya COMELEC dan perluasan hak pilih bagi wanita yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, selain juga ditetapkannya pembagian 12 daerah pemilihan (lihat BAB III).

Walaupun demokrasi semenjak konstitusi 1935, selalu diwarnai oleh kekerasan politik namun demokrasi dapat dikatakan “berjalan”. Hal ini dapat dibuktikan dengan berlangsungnya pemilihan secara berkala. Kecuali Marcos yang memanipulasi konstitusi untuk melanggengkan kekuasaannya, tidak seorangpun pernah dipilih kembali (lihat pada BAB III). Sebagai akibatnya, tidak ada kesinambungan kebijakan presiden karena setiap empat tahun presiden baru mengambil alih kepemimpinan nasional. Dia dapat memperkenalkan program khususnya sendiri selama masa baktinya, tetapi penggantinya, hampir selalu dari partai saingannya, mengesampingkannya dan menggulirkan programnya sendiri.

Tabel I.1

Praktek demokrasi di Filipina, sebelum dan sesudah Marcos

Kolonial Spanyol (1571-1898)	Kolonial Amerika (1898-1946)	PASCA Kemerdekaan (1946-1965)	Masa Pemerintahan Ferdinand Marcos (1965-1986)
<ul style="list-style-type: none"> • Demokrasi belum terwujud • Pemilihan <i>datu, gobernadorcilla</i>, <i>barangay</i> dilakukan oleh Pemerintah kolonial Spanyol (misionaris gereja utusan raja Spanyol) • 1740 penarikan upeti oleh Spanyol dimusyawarahkan, tanpa paksaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peletakan dasar demokrasi • 1907 - pemilihan nasional I legislatif dan dewan nasional - wanita belum memiliki hak pilih, hanya sebagian pria yang memenuhi syarat. - Partai nasionalis • 1935 - dibentuk COMELEC - wanita memiliki hak pilih - partai nasionalis dan liberal. - Berjalan system demokrasi dua partai, seperti di AS 	<ul style="list-style-type: none"> • 1946 kemerdekaan Filipina • Manuel Roxas (46-48) dari Partai Liberal meninggal dikantor, dibunuh oleh wakil presiden Elpido Quirino • Elpido Quirino (49-53) dari partai liberal • Ramon Magsaysay (53-57) dari partai nasionalista meninggal dikantor, dibunuh wakil presiden Carlos Garcia • Carlos Garcia Dari partai nasionalista • Diosdado Macapagal dari partai liberal. (61-65) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1965 diangkat jadi presiden dari partai nasionalista • 1969 kembali memenangkan pemilu (mengubah tradisi) • 1972 - Pemberlakuan Martial Law - Pemilu ditiadakan sampai 1978 - Konggres dihapuskan - Penghapusan <i>writ of habeas corpus</i> - Kebebasan pers dibatasi - Penangkapan tokoh-tokoh oposisi • 1978 - pemilu pertama setelah <i>Martial Law</i> - bentuk KBL jadi partai tunggal • 1981 pembatalan <i>Martial Law</i> • 1984 - oposisi mulai bangkit • 1986 - Marcos ditumbangkan oleh revolusi ESDA.

Data diperoleh dari berbagai sumber: 1. Pengantar Sejarah Filipina. 2. Politik Pemilu Asia Tenggara & Asia Timur.

Perjalanan proses demokrasi yang panjang ternyata tidak mampu membuat demokrasi menjadi lebih matang dan maju di Filipina. Fakta pokok bahwa di Filipina terdapat perbedaan kelas yang ekstrim diantara tuan-tuan

tanah sebagai kaum borjuis dan buruh tani sebagai kaum proletar telah menjadi faktor utama penyebab gagalnya suatu proses menuju demokrasi yang lebih baik.

“By 1945, no Southeast Asia country except the Philippines had ever known a single day of democracy. Under U.S guidance, Filipino Jurist built a structure of constitutional democracy. But inequitable landholding patterns from colonial days remained, and Filipino politics was dominated by elite families that controlled whole provinces. Even today, the Philippines remains a system dominated by a few dynastic families. Economic and political elites have fused. The great landowning families saved their privileges by dominating politics and today have branched out into manufacturing and banking. Their wealth cannot be completely hoarded but must be spread down through their encourage. This elite supports political democratization because it always has been able to dominate the process and determine the outcome”⁷

Sebelum Marcos menjadi Presiden Filipina, pemilihan umum di Filipina bebas dari intimidasi pemerintah, akan tetapi pemilihan politik ini sering berubah menjadi konflik berdarah antara para oligarki lokal yang menjadikan pemilihan sebagai ajang persaingan. Oligarki lokal ini terdiri dari tuan-tuan tanah yang kaya raya dan memiliki tanah yang sangat luas, dan selama berabad-abad mereka mendominasi di provinsi masing-masing, baik itu dominasi di sektor ekonomi maupun di sektor politik. Dengan kata lain persaingan kekuatan-kekuatan politik akhirnya berpusat pada beberapa orang kaya saja.

Di Filipina, kekuatan politik seseorang diukur dengan kemampuannya dalam mengumpulkan jumlah suara di pemilihan umum. Dulu para tuan-tuan tanah (*land lords*) yang umumnya aktif berpolitik mengharapkan suara dari orang-orang yang menggarap tanahnya. Karena mereka masih buta politik dan

⁷ Clark D. Neher, *Opcit.* Hal. 193

kehidupan mereka sangat bergantung kepada tuan-tuan tanah itu. Kemudian perkembangan pendidikan telah membuat mereka “sedikit” pandai berpolitik, karena kepandaian berpolitik mereka hanya sejauh menjual suara mereka kepada orang-orang yang bisa membelinya dengan harga tertinggi. Dari sinilah dimulai tingkah laku tawar menawar (*bargaining*) dalam politik di Filipina. Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan makna demokrasi yang sesungguhnya. Karena suara yang telah dibeli bukanlah untuk memperjuangkan kepentingan orang-orang miskin yang menjual suara itu, melainkan untuk kepentingan orang-orang kaya yang mampu membeli suara dari masyarakat miskin. Bahkan sebagian dari mereka ada yang menjual kembali kepada orang yang lebih kaya lagi sehingga muncul perdagangan suara. Tentunya faktor-faktor seperti ini sangat tidak kondusif bagi tumbuhnya demokrasi di Filipina.

C. Pokok Permasalahan

Dari penggambaran latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis dapat menggarisbawahi yang menjadi pokok permasalahan adalah :
“Bagaimana strategi yang dilakukan Marcos dalam upaya melemahkan demokrasi di Filipina?”

D. Kerangka Dasar Teoritik

Seperti halnya karya ilmiah yang lain, maka pada penulisan skripsi ini dibutuhkan sesuatu kerangka dasar teori. Kerangka dasar teori dipakai guna membantu dalam menentukan tujuan serta arah penelitian dalam memilih konsep yang tepat, guna membentuk suatu hipotesa. Teori pada pokoknya

merupakan pernyataan mengenai suatu hubungan sebab-akibat atau adanya korelasi positif antara gejala-gejala yang diteliti dari suatu atau beberapa faktor tertentu.

Teori adalah suatu bentuk penjelasan paling umum yang memberitahu kita mengapa suatu itu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga terjadi.⁸ Teori juga menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan.⁹

Sebagai penunjang yang bersifat eksplanatori dalam kerangka dasar teori ini, maka digunakan teori-teori demokratisasi antara lain :

1. Oleh Robert A. Dahl

Menurut Robert A. Dahl : Semakin Tinggi Tingkat Sosial ekonomi suatu negara maka akan semakin mungkin bagi negara tersebut untuk menjadi demokratis¹⁰. Selain pembangunan ekonomi, terdapat pula pembangunan politik, karena keduanya mempunyai ikatan erat dan saling mempengaruhi. Menurut Dahl Pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan tanpa dukungan stabilitas politik mantap.

Robert A. Dahl mengemukakan bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang sepenuhnya responsif terhadap semua warga negaranya, dan semua warga negara berkesempatan untuk :¹¹

⁸ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 185

⁹ *Ibid*, hal. 186

¹⁰ Robert A. Dahl, *Polyarchy : Participation and Opposition*, New Heaven : Yale University Press, 1971, hal.65

¹¹ Georg Sorensen, "*Demokrasi dan Demokratisasi*" : *Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah*. Pustaka Pelajar, Yogya, 2003, hal. 18

- 1) Merumuskan pilihan mereka sendiri.
 - 2) Menyampaikan pilihan mereka kepada sesama warga maupun pemerintah baik secara perorangan maupun kelompok.
 - 3) Dalam menyampaikan pilihan tersebut diperlakukan sama oleh pemerintah tanpa memandang isi maupun sumber pilihan tersebut.
- Ketiga kesempatan ini tergantung pada sejumlah jaminan kelembagaan berikut ini :

1. Kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi.
2. Kebebasan mengeluarkan pendapat.
3. Hak memilih.
4. Kesempatan menjadi pejabat pemerintah (bagi semua warga negara).
5. Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan dan hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih suara.
6. Sumber-sumber informasi alternatif.
7. Pemilihan umum yang bebas dan adil.
8. Lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung pada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya.

Tiga definisi demokrasi, menurut Dahl, yaitu :¹²

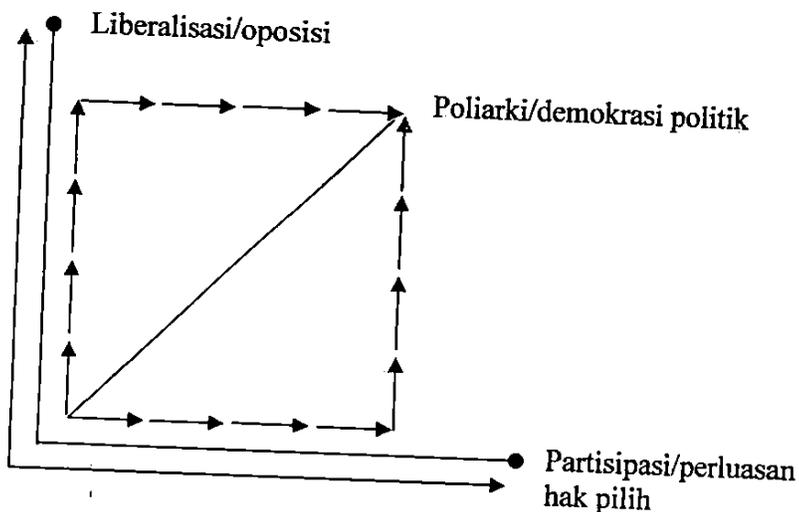
1. Kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh

posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan.

2. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakannya paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan.
3. Tingkat kebebasan politik dan sipil, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Dahl menyebut sistem demokrasi seperti ini sebagai poliarki, ia juga menjelaskan tentang dimensi-dimensi demokrasi yang merupakan jalan menuju demokrasi yang dapat kita lihat melalui sebuah diagram.¹³

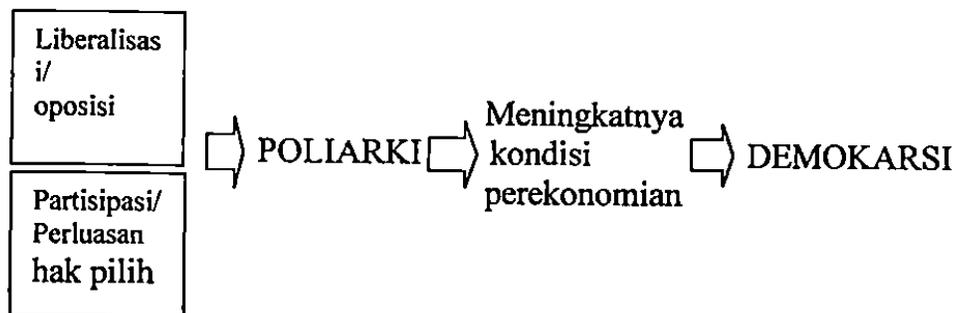
Diagram I.1.



¹³ Robert A Dahl, *Opcit*, hal. 23

Sehingga teori yang kemudian muncul adalah Demokrasi akan terjadi apabila terjadi poliarki, dimana oposisi dan partisipasi sama-sama tinggi. Jika ini terjadi maka kestabilan politik dapat tercapai dan membawa dampak yang positif bagi perkembangan sosial dan ekonomi (liberalisasi / oposisi biasanya ditandai dengan terbitnya UU multi partai). Pada kasus negara, bisa jadi partisipasi yang terlebih dahulu meningkat, baru kemudian peningkatan liberalisasi, atau sebaliknya. Kondisi yang diperlukan agar demokrasi politik (poliarki) berjalan lancar menurut Dahl, yaitu :

1. Para pemimpin tidak menggunakan koersi kekerasan, yaitu polisi dan militer untuk meraih atau mempertahankan kekuasaannya.
2. Adanya organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis.
3. Potensi konflik dalam pluralisme struktural dipertahankan pada tingkat yang masih dapat ditoleransi.
4. Dalam masyarakat, khususnya yang aktif dalam politik, ada budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi dan lembaga poliarki



Adapun kondisi demokrasi meliputi : adanya sistem kelas yang terbuka, adanya kemakmuran ekonomi, adanya ekonomi kapitalis, tingkat industrialisasi yang tinggi serta pendidikan yang memadai, pembatasan penggunaan kekerasan secara minimal, hubungan sosial yang bersifat egaliter tanpa hierarki yang ketat, mengakui dan menganggap wajar adanya keragaman, toleran terhadap perbedaan pendapat, menjunjung tinggi sikap kompromi dan akomodatif, serta bersedia mengakui kekalahan.

Di Filipina, sistem politik yang dikuasi oleh para tuan-tuan kaya, telah membentuk hubungan personal *Patron-Klien*. Dimana para *Klien* (Petani penggarap) sangat tergantung para *Patron* (Tuan tanah) sehingga tidak adanya liberalisasi didalam setiap pemilihan, walaupun setidaknya perluasan partisipasi politik sudah diatur dan dijamin didalam konstitusi 1935, dengan dibentuknya COMELEC. Namun kekerasan dan potensi konflik didalam kancah politik tidak dapat dihindari, hal ini salah satunya dikarenakan para oligar yang aktif berpolitik umumnya memiliki tentara "pribadi". Keadaan semakin memburuk setelah Marcos memberlakukan *Martial Law*

ditahun 1972, peran COMELEC dipersempit, kecurangan didalam pemilihan (terutama pemilihan ditahun 1978) semakin tampak jelas. *Kilusang Bagong lipunan* (KBL) bersaing tidak sehat dengan partai oposisi yang memang belum bersatu. Sehingga KBL menjadi partai tunggal yang memenangkan suara mayoritas didalam pemilihan. Tampak jelas bahwa : Poliarki / Demokrasi politik tidak terjadi di filipina pada masa pemerintahan Marcos setelah diberlakukannya *Martial Law*.

Krisis ekonomi yang melanda Filipina tidak dapat dipisahkan dari krisis politik yang terjadi dalam Negeri itu. Krisis politik telah terjadi di Filipina semenjak Marcos terpilih kembali untuk kedua kalinya di tahun 1969. Namun puncaknya meletus setelah aksi pembunuhan Benigno Aquino tanggal 21 Agustus 1983. pergolakan ini telah menyebabkan terjadinya arus deras pelarian modal keluar negeri, dan ini menguras cadangan Devisa Filipina yang sebelumnya memang sudah menipis. Pada bulan Oktober 1983 Pemerintah menyatakan tidak mampu membayar utang-utang keluar negerinya dan meminta kepada 483 kreditor agar diberi keringanan berupa penangguhan. Filipina yang mengalami devisa neraca perdaganganya selama tiga tahun

terakhir dari 1980 sampai 1982, ekspor rata-rata tiap tahun US\$ 5,5 Milyar sedang impor US\$ 7,8 Milyar.¹⁴

Untuk menutupi defisit inipun pemerintah terpaksa harus meminjam, tetapi dengan meningkatnya prospek ketidakstabilan politik, telah menghancurkan para investor dan kreditor, baik domestik maupun luar negeri pada Marcos dan pada gilirannya akan mempersulit pemerintah memperoleh pinjaman bank. Hanya dalam tempo dua bulan, para pengusaha menarik dana US\$ 6-8 milyar dari bank-bank Filipina. Larinya modal nyata dalam dua bulan pertama setelah pembunuhan Benigno Aquino diperkirakan lebih dari US\$ 1 Trilyun.¹⁵ Dalam tingkat sosial ekonomi masyarakat yang tidak stabil dan cenderung semakin melemah demokrasi tentunya akan sulit terwujud.

2. Adam Przewoski

Kehadiran aktor politik juga turut memainkan peranan penting di dalam mewujudkan sebuah negara yang demokratis. Karena demokrasi disebabkan oleh individu, kelompok, dan aktor sosial yang berjuang untuk demokrasi. Adam Przewoski membuat terobosan analisis mengenai pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor penting dalam menggerakkan negaranya menuju demokrasi.¹⁶ Dengan kata lain, dalam

¹⁴ John Bresman, *Krisis Filipina Zaman Marcos dan Kerunuhannya*, PT. Gramedia, Jakarta, hal.193-194

¹⁵ Lihat TEMPO 17 Desember 1983, hal.19

¹⁶ Adam Przewoski, "Democracy as a Contingen Outcome of Conflicts," in John Elster and Rune

demokrasi, aktor politik dapat memilih reformasi kebijakan yang menyerang kekuatan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kelompok dominan.

Przewoski menarik kesimpulan bahwa demokratisasi hanya dimungkinkan "jika terdapat lembaga yang memberikan harapan yang masuk akal, bahwa kepentingan kekuatan-kekuatan politik besar tidak akan dirugikan dalam kompetisi demokrasi dengan risorsis yang dikumpulkan oleh mereka.¹⁷

Dengan kata lain, kelompok elit akan mendukung demokrasi hanya jika mereka merasa yakin bahwa kepentingan mereka akan tercapai dalam kondisi yang lebih demokratis. Apabila dalam kondisi yang lebih demokratis kepentingan para elit politik dapat terpenuhi, dengan asumsi semua aset ekonomi dan politik mereka terjamin, maka kelompok elit tersebut akan memperjuangkan sistem politik yang cenderung demokrasi. Begitu pula sebaliknya, bila dalam kondisi yang lebih demokratis ternyata tidak mampu memenuhi kepentingan mereka, maka kelompok elit tersebut tidak akan memperjuangkan sistem politik yang demokratis.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan kerangka dasar teoritik tersebut, hipotesa yang dapat diambil sebagai strategi yang dilakukan Marcos dalam upaya menghambat demokrasi di Filipina adalah sebagai berikut :

¹⁷ *Ibid*, hal. 79

1. Pemberlakuan *Martial Law* oleh Marcos, sebagai upaya mem[erlemah kelompok oposisi.
2. Marcos memperbesar dominasi KBL
3. Upaya Marcos mempertahankan jaringan Patron-Klien dilingkungan komunitas pendukungnya dalam upaya mempertahankan kekuasaannya.
4. Marcos mencari dukungan pengusaha sehingga terbentuk kroni kapitalisme Marcos.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dimulai saat Marcos terpilih menjadi presiden Filipina pada tahun 1965 sampai dengan disaat tumbanganya Marcos pada tahun 1986 (terjadinya revolusi EDSA)

G. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data (*data gathering*) dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur, makalah ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, situs internet dan data lain yang dianggap relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Meskipun menganalisa data sekunder, penulis merasa yakin bahwa penelitian ini tidak akan mengurangi kebenaran ilmiah. Insya Allah.

H. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun dari penelitian yang ingin dicapai adalah :

Pertama, memberikan gambaran secara obyektif mengenai fenomena kehidupan sistem politik demokrasi di Filipina, khususnya di saat sistem itu mengalami kegagalan pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos.

Kedua, penelitian ini bertujuan sebagai perwujudan dari penerapan teori-teori yang pernah penulis peroleh semasa duduk di bangku kuliah.

Ketiga, dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang model dan proses demokrasi yang ada di Filipina, sehingga memudahkan penulis di dalam menganalisa faktor yang menghambat demokrasi yang terjadi di Filipina, khususnya pada masa pemerintahan Marcos.

Keempat, tujuan yang tidak kalah pentingnya, bahwa penelitian ini dijadikan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Di dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang membahas alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teoritik, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, sistematika penulisan.

- BAB II : Dalam bab ini akan dibahas mengenai gejolak politik Filipina pada masa pemerintahan Marcos, yang terdiri dari situasi politik Filipina pada masa Marcos, dengan sub bab: awal karir politik Marcos, gejala politik Filipina *Pre-Martial Law*, keadaan darurat (*Martial Law*). Terakhir akan dibahas mengenai persaingan politik Marcos dan Benigno Aquino, yang terdiri dari karier politik Benigno Aquino, penangkapan Benigno Aquino, dan pembunuhan Benigno Aquino.
- BAB III : Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemberlakuan *Martial Law* sebagai upaya Marcos memperlemah oposisi dan upaya Marcos memperbesar KBL sehingga terjadi kooptasi rezim yang kuat, yang terdiri dari upaya Marcos memperlemah oposisi dengan sub bab partai politik oposisi Marcos yang terbagi atas sistem dua partai sebelum *Martial Law* dan KBL sebagai partai dominan pasca *Martial Law*. Sub bab yang kedua adalah pemberlakuan *Martial Law* yang terbagi atas peran COMELEC dibatasi, kongres dihapuskan dan pemilu ditiadakan, membatasi kebebasan pers, dan penghapusan *Writ of Habeas Corpus* serta penangkapan tokoh-tokoh oposisi. Kemudian akan dibahas pula mengenai upaya Marcos memperbesar KBL dengan sub bab membentuk daerah kantong suara yang terbagi atas Ilocos Norte, dan Visayas dan daerah lain. Sub bab yang kedua adalah propaganda politik Marcos mencari dukungan AS,

sub bab yang ketiga adalah kecurangan dalam pemilu dan kerja sama Marcos dengan militer. Terakhir akan dibahas mengenai kuatnya kooptasi pemerintahan rezim Marcos pasca *Martial Law*, dengan sub bab besarnya pengaruh Marcos dalam lembaga legislatif dan dalam lembaga yudikatif.

- BAB IV : Dalam bab ini akan dibahas mengenai Marcos mempertahankan jaringan patron-klien sebagai upaya mempertahankan kekuasaannya, yang terdiri dari patron-klien dalam demokrasi di Filipina, dengan sub bab tuan-tuan tradisional (*landlords*) dan struktur social masyarakat Filipina. Terakhir akan dibahas mengenai patron-klien pada masa pemerintahan Marcos dengan sub bab kroni kapitalisme Marcos dan otoriterisme konstisional.
- BAB V : Merupakan kesimpulan dari keseluruhan bab yang telah dibahas.